



Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora

Tri Yudianto^{1*}, Prabang Setyono², I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta

² Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Corresponding author : triyudianto@gmail.com

Info Artikel: Diterima 5 Mei 2020 ; Disetujui 3 Oktober 2020 ; Publikasi 1 April 2021

Cara sitasi (Vancouver): Yudianto T, Setyono P, Handayani IGAK. Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2021 Apr;20(1):21-26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>.

ABSTRAK

Latar belakang : Tingginya timbulan sampah merupakan permasalahan global yang berdampak pada kesehatan, oleh karena itu diperlukan strategi dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blora.

Metode : desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi dan menilai tingkat kepuasan dalam pengelolaan sampah. Penentuan sampel secara *Stratified Proporsional Random Sampling* pada penduduk yang bertempat tinggal dilokasi penelitian meliputi kecamatan Jepon, kecamatan Banjarejo, kecamatan Ngawen dan kecamatan kota Blora berjumlah 100 orang. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner untuk bahan wawancara dan observasi lapangan. Model analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan paramater kebijakan untuk mengetahui implementasinya dan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengelolaan sampah.

Hasil : Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik yang berpedoman pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B atau memuaskan.

Simpulan : peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memberikan kepastian hukum dalam implementasi pengelolaan sampah sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan

Kata Kunci: implementasi; kebijakan; pengelolaan sampah; kepuasan

ABSTRACT

Title : Policy Implementation and Strategy on Waste Management: Study Case at Blora Regency

Background: The high level of waste generation is a global problem that impacts on health, therefore a strategy is needed in its management. This study aims to determine the description of the implementation of waste management policies and describe the level of community satisfaction with waste management in Blora Regency.

Method: the research design used is descriptive qualitative to explore and describe the implementation and assess the level of satisfaction in waste management. Determination of the sample by Stratified Proportional Random Sampling of the population residing in the study site included Jepon sub-district, Banjarejo sub-district, Ngawen sub-district and Blora sub-district totaling 100 people. The instrument used was a questionnaire sheet for interview material and field observations. The analysis model uses a qualitative

descriptive analysis method with policy parameters to determine its implementation and the Community Satisfaction Index to assess the level of customer satisfaction with waste management.

Result: *The implementation of waste management in Blora Regency can run well which is guided by the Regional Regulation of Blora Regency Number 1 of 2011 concerning waste management, which is carried out starting from the quotation of user charges, sources of waste generation, storage, collection (TPS), transportation and processing. end (TPS). The level of community satisfaction with waste management services based on the satisfaction index reaches 86.885 with grade B or satisfactory.*

Conclusion: *Local regulations on waste management provide legal certainty in the implementation of waste management so that they are able to provide satisfaction to customers*

Keywords: *implementation; policy; waste management; satisfaction*

PENDAHULUAN

Dalam rangka terwujudnya implementasi pembangunan sanitasi yang sistematis dan tepat sasaran, dibutuhkan perencanaan yang baik dan berkualitas. Melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat menyusun perencanaan strategis bidang sanitasi melalui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).¹

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pengarusutamaan pembangunan sanitasi yang dilakukan secara terintegrasi diseluruh tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kabupaten Blora adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah menjadi peserta program PPSP sejak tahun 2011. Dokumen Strategi Sanitasi meliputi 3 (tiga) sub-sektor kegiatan yaitu, Pengelolaan Limbah Domestik, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Drainase Permukiman.²

Pengelolaan sampah merupakan salah satu sektor utama yang menjadi perhatian karena sangat berdampak terhadap kesehatan lingkungan. Sasaran pembangunan berkelanjutan dalam bidang sanitasi salah satunya adalah meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%) dan terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui *reducereuse-recycle*), green transportation khususnya di kawasan perkotaan.¹

Perkembangan kegiatan ekonomi yang berada di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga arus urbanisasi di kota tersebut mengalami peningkatan dari tahun – ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan migrasi penduduk mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan yang di timbulkan, seperti halnya permasalahan sampah yang saat ini menjadi suatu urgensi dalam suatu perkembangan kota. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.³ Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya

masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA.⁴

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber.³

Timbulan sampah di Kabupaten Blora, terdiri dari : sampah rumah tangga, sampah sejenis dan sampah spesifik. Volume sampah yang dihasilkan dari timbulan sampah Rumah tangga sebanyak : 1000 m³/hari. Timbulan sampah sejenis sebanyak 103 m³/hari, dan timbulan sampah spesifik sebanyak 8,5 m³/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 72 % diangkut ke TPA yang berada di Desa Temurejo, Kecamatan Tunjungan. Sebelum sampah diangkut ke TPA, sampah di tampung di tempat penyimpanan sementara(TPSS) di wilayah Kecamatan Blora dan Cepu. Jumlah tempat penyimpanan sementara(TPSS) di kabupaten 68 buah, dengan perincian di Kota Blora berjumlah 55 buah dan Cepu 13 Buah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 28% di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai.⁵⁻⁶

Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Blora saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolannya. Pada umumnya pengelolaan sampah responden di Kabupaten Blora dilakukan secara swakelola. Sebagian besar masyarakat membakar sampah sebesar 50,4%, dibuang di lahan kosong/ kebun/hutan 27,9%, dibuang ke TPS sebesar 7,92 %. Sementara masyarakat yang membuang sampah ke sungai/kali/laut/danau sebesar 3,75%, dibuang dan dikubur sebesar 4,79 %, dibiarkan sebesar 2,5%, dan Lainnya sebesar 2,71%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai mulai tumbuh. Selain membuang sampah ke sungai sebagian kelompok membuang sampah di luar

rumah seperti di sungai kecil, parit, kolam ikan/tambak.^{2,7}

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora mengacu pada perda No. 1 tahun 2011 tentang pengolahan persampahan yaitu sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Usaha lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah.⁸

Studi mengenai implementasi dan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini menjadi kajian yang sangat menarik dan strategis, sebagai sebuah upaya untuk mengevaluasi dan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Blora.

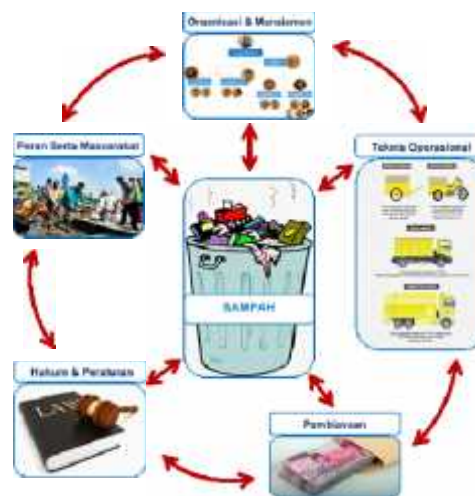
MATERI DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan termasuk penelitian evaluasi.⁹ Berdasarkan tingkat eksplanasi dan analisisnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan implementasi pengelolaan sampah dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Blora. Subyek penelitian adalah

pemangku kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora yaitu Pengurus RT/RW, Pengelola Sampah, masyarakat pelaku, Pejabat Kelurahan, Pejabat Kecamatan, dan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup. Penentuan sampel untuk menilai tingkat kepuasan diambil secara *Stratified Proporsional Random Sampling* pada penduduk yang bertempat tinggal dilokasi penelitian meliputi kecamatan Jepon, kecamatan Banjarejo, kecamatan Ngawen dan kecamatan kota Blora berjumlah 267.953 orang sedangkan yang dijadikan sampel berdasarkan rumus sebanyak 100 orang. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner untuk bahan wawancara dan observasi lapangan yang dilengkapi dengan informed consent.

Model analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan implementasi sistem pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen sesuai SNI 19-2454-2002 yaitu aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.¹⁰

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atau pelanggan terhadap pengelolaan sampah menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat.



Gambar 1 : Skema Pengelolaan Sampah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan sampah

Dasar hukum pengelolaan persampahan yang digunakan Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan TPA

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melalui Bidang Kebersihan, Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun. Sampai saat ini Bagian Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Cakupan pelayanan meliputi semua kelurahan yang ada di Kabupaten Blora, sebanyak 24 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan.^{11,12,13}

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Model pengelolaan sampah yang dikenal saat ini

antara lain; penimbunan sampah, penanganan di tempat, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.^{14,15}

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Blora secara umum masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan pola kumpul angkut buang sebagaimana juga dilakukan oleh kota-kota Provinsi lainnya di Indonesia. Sumber sampah dibagi menjadi dua jenis sumber, yaitu sumber domestik dan non-domestik.

Untuk sumber domestik berasal dari kegiatan rumah tangga, sedangkan non-domestik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sumber. Untuk sampah non-domestik dibagi menjadi 3, yaitu komersial, institusional dan industri. Secara keseluruhan timbulan sampah di Kabupaten Blora tercantum dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Timbulan sampah per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Timbulan			
		Pedesaan m ³ /Hari	Perkotaan m ³ /Hari	Total m ³ /Hari	Total (%)
Jati	45.773	80,68	33,75	114,43	10,47%
Randublatung	75.096	123,74	64,01	187,74	17,79%
Kradenan	39.387	38,07	60,40	98,47	11,23%
Kedungtuban	57.409	96,12	47,40	143,52	13,49%
Cepu	73.099	58,00	124,75	182,75	21,73%
Sambong	25.297	39,84	23,40	63,24	6,12%
Jiken	40.461	64,30	36,86	101,15	9,75%
Jepon	60.395	106,26	44,73	150,99	13,83%
Blora	92.778	104,97	126,98	231,95	25,36%
Tunjungan	45.918	90,48	24,32	114,80	9,83%
Banjarejo	57.904	118,54	26,22	144,76	12,08%
Ngawen	56.876	119,85	22,35	142,19	11,63%
Kunduran	62.947	124,76	32,61	157,37	13,43%
Todanan	57.767	131,86	12,56	144,42	11,10%
Bogorejo	23.882	52,19	7,52	59,71	4,75%
Jajah	33.949	65,10	19,78	84,87	7,40%
Total	848.938	1.415	708	2.122	100%

Model pewadahan yang dilakukan di daerah perkotaan Kabupaten Blora masih banyak menggunakan bak sampah dan tong sampah ataupun menggunakan jenis pewadahan tetap keranjang bekas, bak karet, Drum bekas dan lain-lain. Pada sebagian kecil jalan protokol wadah sampah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan sebagian lainnya menggunakan bak karet yang disediakan secara swadaya atau oleh kelompok masyarakat (RT/RW) untuk daerah permukiman. Aktivitas ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹⁶ Bentuk pewadahan yang ada sudah memenuhi kriteria pewadahan sampah yang baik yaitu wadah tidak mudah rusak, kedap air, tertutup, dan mudah dikosongkan.¹⁷ Sistem pewadahan yang dikelola dengan baik akan menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah.¹⁸

Sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blora pada umumnya adalah berpola individual tidak langsung atau sampah dikumpulkan dari tiap-tiap rumah oleh petugas kebersihan lingkungan dan selanjutnya di kumpulkan di TPS yang menjadi area kerjanya. Untuk sampah dari pasar umumnya menggunakan pola komunal langsung ataupun tidak langsung, sedangkan di wilayah perdagangan ataupun pertokoan di pinggir jalan dilakukan pengumpulan dengan pola individual langsung. Armada pengumpulan menggunakan

gerobak sampah, becak sampah dan Motor Viar (motor roda tiga). Fasilitas TPS yang tersedia berupa tempat sampah/bin, container dan transfer depo dilokasi yang telah ditentukan. Sarana pengumpulan yang terdapat pemilahan sampah akan efektif dan efisien untuk proses selanjutnya.¹⁹

Pengumpulan sampah dari sumbernya dengan pola individu tidak langsung diangkut menggunakan gerobak maupun kendaraan roda tiga, dan merupakan swadaya masyarakat, kemudian di buang ke TPS. Pada tahap pengumpulan ini ada kesadaran masyarakat, hal ini sejalan terdahulu bahwa perilaku individu yang sadar lingkungan akan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.²⁰⁻²¹ Sedangkan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh DLH seperti penyapuan jalan, dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada ruas jalan dan jadwal yang telah ditentukan dan selanjutnya langsung dibawa ke TPA.

Kegiatan pengangkutan sampah sangat tergantung dari pola jaringan jalan yang dilalui dan jangkauan pelayanan atau batas-batas geografis yang dapat dijangkau oleh armada transportasi sampah. Alat transportasi pengangkut sampah di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu yaitu menggunakan Arm Roll Truck (ARM), motor sampah, gerobak, dan Dump Truck. Kondisi armada pengangkutan sampah rata-

rata masih dalam kondisi baik, sehingga belum perlu dilakukan peremajaan armada.

Sampah terangkut dari TPS kemudian dibuang ke TPA. Jumlah TPA di Kabupaten Blora ada 2 buah. Pertama berada di Desa Temurejo, Kecamatan Blora yang menampung sampah dengan volume rata-rata tahun 2016 176,83 m³/hari untuk Kecamatan Blora dan kecamatan sekitarnya. Luas TPA Temurejo 3,9 Ha. TPA Temurejo menggunakan metode open dumping, dimana sampah dimasukkan dalam lubang, lalu lubang ditimbun dengan tanah, kemudian diberikan pipa yang berfungsi sebagai cerobong gas. Fasilitas pendukung TPA Temurejo diantaranya adalah Instalasi pengolahan air lindi limbah sampah (*leachate*), sumur pantau untuk mengetahui terjadinya pencemaran air tanah berjumlah 3 buah. Sedangkan peralatan berat yang ada di TPA adalah Buldozer 1 unit. TPA kedua adalah TPA Tambakromo berada di Dusun Nglebok, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu yang melayani untuk wilayah Kota Cepu dan sekitarnya dengan luas 1,5 Ha dengan volume sampah yang diterima setiap hari rata-rata sebanyak 64,22 m³/hari. Metode yang digunakan di TPA Tambakromo adalah open dumping, dimana sampah ditimbun di area terbuka tanpa ditutup tanah kemudian dilakukan pemadatan dengan buldozer. Penerapan pengolahan sampah dengan menggunakan metode *recycle*, konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) di awal akan menunda atau mencegah

penumpukan sampah TPA bahkan dapat mengurangi volume timbulan sampah.²²

Retribusi pelayanan persampahan diatur melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk besarnya tarif Kelas I sebesar Rp. 10.000, Kelas II sebesar Rp 8.000, dan Kelas III sebesar Rp. 6.000,-. Sumber dana untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora berasal dari APBN, APBD, dan swasta. Dana yang berasal dari APBN pada umumnya digunakan untuk pengadaan barang/investasi, misalnya pengadaan jembatan timbang di TPSA, dump truck, arm-roll dan incinerator. Hal ini menunjukkan pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah berasal dari iuran warga, atau retribusi sampah maupun penerima retribusi sampah dapat membantu dalam pengelolaan sampah.²³

2. Tingkat kepuasan masyarakat

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan pelayanan persampahan rumah tangga dilaksanakan dengan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Responden berjumlah 100 orang dari 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Jepon, kecamatan Banjarejo, kecamatan Ngawen dan kecamatan kota Blora. Berdasarkan data responden yang dihimpun, hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dapat dilihat tabel 2 berikut :

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelayanan Persampahan Rumah Tangga di Kabupaten Blora

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Per unsur	Nilai Rata-rata per unsur	Mutu	Nilai Rata-rata Tertimbang Per unsur
1	Prosedur Pelayanan	259	2,590	B	Puas
2	Persyaratan Pelayanan	257	2,570	B	Puas
3	Kejelasan Petugas	258	2,580	B	Puas
4	Kedisiplinan Petugas	255	2,550	B	Puas
5	Tanggung jawab petugas	254	2,540	B	Puas
6	Kemampuan Petugas	252	2,520	B	Puas
7	Kecepatan pelayanan	253	2,530	B	Puas
8	Keadilan	251	2,510	B	Puas
9	Kewajaran Biaya	213	2,130	C	Kurang puas
10	Ketepatan Jadwal	204	2,040	C	Kurang puas
11	Kondisi infrastrukural	192	1,920	C	Kurang puas
12	Kondisi Fisik Petugas	162	1,620	D	Tidak Puas
13	Penyampaian Keluhan	169	1,690	D	Tidak Puas
14	Ketepatan lokasi TPS/TPA	151	1,510	D	Tidak Puas
Total Nilai Rata-rata tertimbang per unsur					3,474
Nilai IKM Konversi Unit Pelayanan					86,858
Mutu Pelayanan					Memuaskan

Dari tabel 2 terkait 2. Terkait Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelayanan Persampahan Rumah Tangga di Kabupaten Blora, secara umum dan keseluruhan masyarakat mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Blora Memuaskan. Indeks kepuasan pelanggan mencapai angka 86,858 yang berada dalam range dengan grade B atau

memuaskan. Unsur yang mendapatkan penilaian memuaskan yakni pada pertanyaan nomor 1 sampai 8, Pelanggan kurang puas terhadap kewajaran biaya yang nilainya agak tinggi sementara ketepatan jadwal pengambilan tidak sesuai dan kondisi infrastrukural kurang perawatan. Unsur lain yang mendapat nilai tidak puas adalah pernyataan nomor

12,13,dan 14, hasil wawancara mengatakan bahwa hal yang tidak disetujui adalah penyampaian keluhan atau saran kritik selama ini tidak ditindaklanjuti dan lokasi TPS sangat berdekatan dengan rumah penduduk dan pengambilannya tidak menentu sehingga menimbulkan bau dan estetika lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan indikator-indikator kinerja kepuasan bahwa pengelolaan di Kabupaten Blora sudah memuaskan bagi pelanggan sebagai bentuk keberhasilan dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah, walaupun perlu ada perbaikan sesuai saran dan masukan masyarakat maupun unsur lainnya.²³

SIMPULAN

Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 meliputi retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS).

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora berdasarkan Indeks kepuasan pelanggan mencapai angka 86,858 yang artinya memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden. Nomor 185 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Jakarta; 2014.
2. Pokja AMPL Kabupaten Blora. Program Sanitasi Kabupaten Blora. Blora; 2017.
3. Kustiah T. Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Bandung; Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum; 2005.
4. Sudharto H. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press; 2005.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Blora; 2017.
6. Dinas Lingkungan Hidup. Studi Kebijakan Manajemen Pengelolaan TPA Kabupaten Blora. Blora; 2019.
7. Syafrudin, CES, Ir. MT. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat(Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang). Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu. 2004.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung; Alfabeta; 2017.
9. Badan Standar Nasional. SNI 19-2454-2002 Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Jakarta; 2002.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Blora; 2011.
11. Peraturan Bupati Blora. Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Blora; 2018.
12. Faizah. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Semarang; Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2008.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Kementrian Menteri Pekerjaan Umum; 2013.
14. Widyatmoko, & Moerdjoko, S. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Jakarta: Abadi Tandur; 2002.
15. Mardikato & Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif kebijakan Publik Bandung; Alfabeta; 2012.
16. Cicilia Kartika KI, Budi P Samadikun, Dwi Siwi Handayani. Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Kelurahan Jabingan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang). Jurnal Teknik Lingkungan. 2017; 12: p. 4-5.
17. Harmayani. KD. Analisis Pendekatan Lima Aspek Pendukung Penanganan Sampah dalam Penelitian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tambunan. 2009; 11: p. 6-15.
18. Afofi Wijaya, Rizal Alfansi, Benardin. Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan. 2013; 95: p. 90-95.
19. Laksono KJT, Sjabadhyni B. Motif kepedulian lingkungan dan kaitannya dengan perilaku konsumen sadar lingkungan. 1(1): 1-38. Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa. 2012; 1(1): p. 1-38.
20. Isti Surjandari, Akhmad Hidayatno, dan Ade supriatna. Model Dinamis Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi Beban Penumpukan. Jurnal Teknik Industri. 2009; 147: p. 138-139.
21. Nur Azizah Affandy, Enik Isnaini dan Cicik Helina Yulianti. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan. 2015; 814:807.
22. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Blora Dalam Angka 2019. 2019.
23. Monica Sitanggang, Ika Bagus Priyambada, Syafrudin. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus RW 6,7, 8 Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara). Jurnal Teknik Lingkungan. 2017; 9: p. 5-8.